

Tidak Dilembagakan dan Namanya akan Diubah

Forum Demokrasi Sepakati 5 Komitmen

JAKARTA, (PR).-

Pemerintah dan Forum Demokrasi, yang masing-masing diwakili Dirjen Sospol Depdagri, Drs. Harisoegiman, dan Ketua Forum Demokrasi, Abdurrahman Wahid, dalam pertemuannya Selasa kemarin di Jakarta menghasilkan lima komitmen.

Hal itu diungkapkan Harisoegiman kepada pers, sesuai mengadakan pertemuan dengan Abdurrahman Wahid di Depdagri Jakarta, Selasa. Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Rudini, ketika akan pulang dari kantornya kemarin menyatakan kepada wartawan, Forum Demokrasi silakan jalan.

"Sejak Forum Demokrasi dibentuk, sudah saya katakan, kalau memang forum tersebut merupakan usaha sekelompok masyarakat untuk mengembangkan demokrasi Pancasila secara konsekuen, hal itu tidak menjadi masalah, bahkan sesuai dengan GBHN," kata Rudini.

Lima komitmen itu, menurut Harisoegiman, ialah Forum Demokrasi (Forsi) tidak akan dilembagakan. Forum ini hanya akan berbentuk sarasehan, simposium, seminar dan sebagainya yang bersifat terbuka. Artinya, semua orang boleh mengikuti acara tersebut, dan tidak terbatas kepada anggota tertentu yang tetap.

Kedua, Forsi tidak akan mengarah untuk menjadi lembaga demokrasi lain di luar lembaga yang sudah baku di Indonesia, baik DPR, DPRD Tingkat I maupun II. "Dengan demikian Forum Demokrasi masih berada dalam sistem politik kita."

Ketiga, Forsi tidak akan menjalan politik praktis. Ia tidak bersifat eksklusif, tidak pula melakukan oposisi, karena di Indonesia tidak dikenal oposisi.

Keempat, setiap hasil sumbang-an pemikiran Forsi akan disalurkan melalui lembaga demokrasi yang ada.

Kelima, Abdurrahman Wahid akan mengubah nama Forum Demokrasi dengan nama lain. Menu-

rut Harisoegiman, nama Forum Demokrasi diterima masyarakat dengan disalahartikan. "Karena itu Gus Dur (panggilan akrab Abdurrahman Wahid) akan mengubah nama Forum Demokrasi itu dengan nama lain yang lebih pas."

Terserah nama apa
Rudini maupun Harisoegiman tidak bersedia memberikan nama lain untuk Forum Demokrasi. "Terserah Gus Dur mau menamakan apa. Namanya juga demokrasi, makanya bebas memberikan nama."

"Soalnya kalau tetap dinamakan demokrasi, nanti akan mendapat pertanyaan demokrasi apa dan demokrasi yang mana? Padahal demokrasi sifatnya universal. Sedangkan kita menganut demokrasi Pancasila," tutur Harisoegiman.

"Maka," lanjut Harisoegiman, "untuk menghindari salah tafsir, Pak Dur dan kami sepakat untuk mengubah nama itu. Bahkan istilah Forum sendiri sejak semula menjadi masalah. Sebab dengan menamakan seperti itu akan dikaucaikan dengan nama Liga Demokrasi, suatu wadah yang melahirkan Solidaritas Buruh di Polandia."

Menanggapi keberadaan Forsi itu sendiri, Harisoegiman menyatakan, idenya memang baik karena demi kesatuan dan persatuan bangsa. Tapi cara penggarapan, mekanisme, dan penyalurannya tidak boleh menyimpang dari sistem yang sudah ada.

Pasti bertujuan politik
Sementara itu, Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Afan Gaffar, MA, menjawab pertanyaan "PR" dan *Pelita* di Yogyakarta, Selasa siang, mengemukakan, pembentukan Forum Demokrasi pasti bertujuan politik. Namun, pemerintah hendaknya

mentolerir dan mendukung, karena forum tersebut bukan merupakan sesuatu yang mengancam eksistensi pemerintah.

Menurut Afan, nonsen bila ada yang mengatakan Forum Demokrasi pimpinan Abdurrahman Wa-

hid itu tidak mempunyai tujuan politik. "Saya belajar politik, jadi saya tahu persis bahwa forum itu mempunyai tujuan politik," kata Afan Gaffar, Sarjana Ilmu Politik yang menjadi Ketua Jurusan Politik di UII ini.

Ia sendiri mengaku tidak setuju dengan sikap yang diambil Abdurrahman Wahid, namun mendukung segala upaya yang bersifat demokrasi. "Pemerintah pun hendaknya mentolerir dan mendukung hidup forum itu," katanya.

Afan Gaffar menganggap, pemerintah bahkan seharusnya berterima kasih pada usaha masyarakat menegakkan demokrasi dengan cara-cara yang sehat sebagaimana yang ditempuh Forum Demokrasi. "Tapi, tentu saja Forum Demokrasi harus memenuhi ketentuan yang berlaku bagi sebuah organisasi, seperti mempunyai AD/ART, terdaftar, dan sebagainya."

Pembentukan forum itu, katanya, harus dilihat sebagai upaya masyarakat membantu pemerintah mengembangkan kesadaran berdemokrasi pada bangsa Indonesia. "Seharusnya, pemerintah berterima kasih pada Forum Demokrasi," tambahnya.

Dari alasan dan tujuan forum itu, Afan menyatakan tidak melihat adanya hal-hal yang mengancam eksistensi pemerintah. Sebaliknya, justru Forum Demokrasi membantu memperlancar program keterbukaan yang dilaksanakan pemerintah. "Bagi kita, keterbukaan kan masih menjadi masalah," katanya.

Masalah utama, menurutnya, terletak pada konsep demokrasi Pancasila yang bersifat musyawarah mufakat, tapi diterjemahkan sebagai mufakat lebih dahulu dari musyawarah. "Coba lihat cara pembebasan tanah yang dilakukan sekarang. Sebelum musyawarah, pihak berwenang sudah menentukan mufakatnya, hingga selalu melahirkan ketidakpuasan."

Menyesalkan
Afan Gaffar juga menyatakan keprihatinannya pada alasan-alasan pembentukan Forsi yang dikemukakan Abdurrahman Wahid, antara lain makin menonjolnya sikap sektarianisme (mementingkan golongan). "Saya kira alasan ini tidak masuk akal dan tidak punya dasar," ujar Afan.

Ia meragukan pembentukan Forsi telah dirancang jauh sebelum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) terbentuk. "Dari nama-nama yang membentuk Forum

Forum Demonstrasi Sepakati 5...

Demokrasi, saya tahu bahwa mereka merupakan kelompok yang anti-ICMI. Jadi, kalau Abdurrahman Wahid mengatakan alasan utama pembentukan Forum Demokrasi adalah karena menonjolnya sikap sektarianisme, saya kira maksudnya adalah ICMI," tandas Afan.

Dengan sinyalemen yang demikian, Afan menyatakan penyesalannya yang sangat mendalam pada sikap yang diambil Abdurrahman Wahid. Ia juga mengatakan, sikap itu menunjukkan bahwa Forum Demokrasi yang membawa bendera demokrasi, sebetulnya tidak menginginkan demokrasi secara murni. "Sebab, demokrasi akan melahirkan diversifikasi dan keberagaman. Anti-keberagaman sama dengan tidak demokratis," jelasnya.

Selain itu, Afan memandang isu sektarianisme sudah tidak relevan lagi pada saat sekarang, mengingat kesatuan dan persatuan sudah terbentuk dengan kokoh. "Saya tidak melihat adanya kesan dari kaum intelektual maupun golongan lain yang cukup sehat, yang mau mengorbankan persatuan demi kepentingan golongan. Termasuk golongan agama," katanya.

Dari sudut ini, Afan memandang alasan yang dikemukakan sebagai dasar pembentukan Forum Demokrasi sangat dicari-cari dan sama sekali tidak masuk akal. "Karena itu, saya sangat sesalkan," ulangnya. ***